

ASEAN

DALAM

BAYANG-BAYANG KEKUATAN BESAR

TANTANGAN, PELUANG, DAN STRATEGI
DI TENGAH PERSAINGAN GLOBAL



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman, Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

3 April 2026

ASEAN DALAM BAYANG-BAYANG KEKUATAN BESAR

Abstrak Singkat

Makalah ini membahas posisi ASEAN di tengah persaingan kekuatan besar yang semakin tajam pada era Indo-Pasifik. Argumen utamanya adalah bahwa ASEAN bukan sekadar objek tarik-menarik Amerika Serikat, Tiongkok, dan kekuatan lain, melainkan juga aktor kelembagaan yang terus berupaya mempertahankan relevansi melalui prinsip sentralitas, inklusivitas, dan regionalisme berbasis aturan. Namun, kapasitas itu terus diuji oleh rivalitas geoekonomi, sengketa maritim di Laut Cina Selatan, krisis Myanmar, serta munculnya pengaturan keamanan dan ekonomi di luar mekanisme ASEAN. Dalam konteks ini, “bayang-bayang kekuatan besar” tidak selalu berarti dominasi langsung, tetapi lebih sering muncul sebagai tekanan struktural yang memaksa ASEAN menyeimbangkan kepentingan keamanan, stabilitas, perdagangan, dan legitimasi politiknya.

Makalah ini menegaskan bahwa masa depan ASEAN sangat bergantung pada kemampuannya menjaga persatuan internal, memperkuat kapasitas institusional, mengelola perbedaan antaranggota, dan menerjemahkan sentralitas dari slogan diplomatik menjadi kemampuan nyata untuk membentuk agenda kawasan. ASEAN tetap penting karena kawasan ini menjadi simpul perdagangan, investasi, rantai pasok, dan arsitektur keamanan Asia. Namun pentingnya ASEAN justru membuatnya semakin rentan terhadap penetrasi pengaruh eksternal. Karena itu, tantangan ASEAN bukan hanya bertahan dari persaingan kekuatan besar, tetapi memastikan bahwa Asia Tenggara tidak berubah menjadi sekadar arena kompetisi pihak lain. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Kata Kunci

ASEAN; sentralitas ASEAN; Indo-Pasifik; kekuatan besar; Amerika Serikat; Tiongkok; Laut Cina Selatan; Myanmar; geoekonomi; regionalisme.

ASEAN dalam Bayang-Bayang Kekuatan Besar

I. Pendahuluan

Pada masa Perang Dingin, Asia Tenggara kerap dipahami sebagai wilayah penyangga, daerah rawan konflik, dan ruang perebutan ideologi. Namun dalam dua dekade terakhir, posisinya berubah menjadi salah satu pusat gravitasi ekonomi dan geopolitik dunia. Kawasan ini berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, menghubungkan jalur perdagangan global, sekaligus menjadi rumah bagi pertumbuhan pasar, manufaktur, dan ekonomi digital yang cepat. Karena itu, ketika rivalitas kekuatan besar meningkat, Asia Tenggara kembali menjadi penting—bukan lagi semata karena perang ideologi, melainkan karena perdagangan, rantai pasok, teknologi, konektivitas, dan kontrol atas tatanan kawasan. ASEAN sendiri melalui dokumen Outlook on the Indo-Pacific menegaskan bahwa kawasan Indo-Pasifik harus dipandang sebagai ruang yang saling terhubung, dengan ASEAN memainkan peran sentral dan strategis di dalamnya.

Dalam perspektif inilah judul “ASEAN dalam Bayang-Bayang Kekuatan Besar” memperoleh maknanya. Bayang-bayang tersebut bukan hanya hadir dalam bentuk ancaman militer langsung, melainkan juga dalam bentuk yang lebih halus: tekanan tarif, pengalihan investasi, ketegangan rantai pasok, kompetisi pengaruh diplomatik, sengketa maritim, hingga kontestasi norma dan institusi. Pada 2025, ASEAN secara resmi menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketidakpastian geoekonomi, termasuk

tindakan tarif sepihak yang dianggap menimbulkan tantangan kompleks bagi pertumbuhan, stabilitas, dan integrasi kawasan. ASEAN juga menilai bahwa ketegangan perdagangan dan disrupti rantai pasok merupakan risiko nyata bagi prospek kawasan.

Tetapi ASEAN tidak dibangun untuk menjadi aliansi militer, dan bukan pula proyek integrasi supranasional ala Uni Eropa. Sejak awal, ASEAN adalah organisasi yang dirancang untuk mengelola perbedaan, menurunkan risiko konflik, dan menciptakan ruang dialog bagi negara-negara yang sangat beragam dalam sistem politik, tingkat pembangunan, orientasi luar negeri, dan struktur sosialnya. Karena itu, respons ASEAN terhadap tekanan eksternal hampir selalu berbentuk diplomasi, forum, konsensus, dan formula keseimbangan. AOIP 2019 menegaskan bahwa Indo-Pasifik yang dikehendaki ASEAN adalah kawasan dialog dan kerja sama, bukan kawasan rivalitas; sebuah formulasi yang menggambarkan preferensi dasar ASEAN terhadap keterbukaan, inklusivitas, dan penghindaran blok-blok yang saling menegasikan.

Makalah ini berangkat dari pertanyaan: bagaimana ASEAN mempertahankan relevansinya di tengah rivalitas kekuatan besar yang semakin tajam? Untuk menjawabnya, pembahasan akan menelusuri empat dimensi utama. Pertama, dimensi konseptual mengenai sentralitas ASEAN dan logika regionalismenya. Kedua, dimensi keamanan yang mencakup Laut Cina Selatan, Myanmar, dan dinamika institusi keamanan kawasan. Ketiga, dimensi geoekonomi yang berkaitan dengan perdagangan, investasi, rantai pasok, dan ekonomi digital. Keempat, dimensi kelembagaan yang menyangkut kemampuan ASEAN memperkuat dirinya menuju visi 2045. Dengan demikian, makalah ini hendak menunjukkan bahwa bayang-bayang kekuatan besar baru benar-benar berbahaya ketika ASEAN gagal mengonsolidasikan dirinya sendiri.

II. Kerangka Pemikiran: Sentralitas, Hedging, dan Regionalisme ASEAN

Secara konseptual, posisi ASEAN lebih tepat dipahami bukan sebagai aktor yang memilih salah satu kutub kekuatan, melainkan sebagai organisasi yang berupaya memelihara ruang manuver kolektif di antara kekuatan-kekuatan besar. AOIP menegaskan bahwa ASEAN ingin bertindak sebagai honest broker dalam lingkungan strategis yang diwarnai competing interests. Bahasa ini penting, karena menunjukkan bahwa ASEAN memahami realitas rivalitas, tetapi menolak menjadikan rivalitas itu sebagai prinsip pengorganisasian kawasan. Sebaliknya, ASEAN menempatkan sentralitas sebagai prinsip dasar yang memungkinkan kerja sama tetap berlangsung melalui mekanisme yang dipimpin ASEAN, seperti EAS, ARF, ADMM-Plus, dan forum-forum terkait.

Dalam praktiknya, pendekatan tersebut melahirkan strategi yang sering disebut sebagai hedging. Hedging bukan netralitas pasif, melainkan upaya sadar untuk menghindari ketergantungan total pada satu kekuatan sambil mempertahankan keterbukaan hubungan dengan banyak pihak. Bagi ASEAN, hedging kolektif terwujud dalam bahasa diplomatik yang menekankan prinsip-prinsip universal—seperti penghormatan terhadap hukum internasional, penyelesaian damai sengketa, non-intervensi, dan keterbukaan ekonomi—tanpa secara terbuka mengadopsi logika blok. Karena itu, ASEAN dapat menjalin kemitraan strategis dengan Tiongkok, Jepang, India, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Australia secara bersamaan, sambil tetap menegaskan bahwa semua engagement harus ASEAN-driven dan memperkuat, bukan menggantikan, mekanisme yang dipimpin ASEAN.

Namun, sentralitas ASEAN bukan fakta otomatis; ia adalah klaim politik yang harus terus dibuktikan. Dokumen resmi ASEAN pada 2024 dan 2025 berulang kali menegaskan pentingnya ASEAN Centrality and Unity, bahkan menempatkannya sebagai syarat untuk membentuk regional architecture yang peaceful, stable, open, inclusive, dan rules-based. Pengulangan yang terus-menerus ini justru menunjukkan bahwa sentralitas sedang berada di bawah tekanan. Semakin intens rivalitas eksternal, semakin besar kebutuhan ASEAN untuk menegaskan dirinya sebagai jangkar dialog kawasan. Dengan kata lain, sentralitas tidak bisa dipahami hanya sebagai

posisi struktural, tetapi sebagai proyek kelembagaan yang setiap saat dapat terkikis jika ASEAN terfragmentasi.

III. Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok dan Tekanan terhadap ASEAN

Bayang-bayang paling besar yang kini menaungi ASEAN jelas berasal dari rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok. Persaingan itu tidak lagi terbatas pada soal militer, tetapi meluas ke teknologi, tarif, investasi, rantai pasok, hingga standard-setting. IMF pada Oktober 2025 mencatat bahwa friksi perdagangan dengan Amerika Serikat dan siklus teknologi berbasis AI telah mendorong kenaikan perdagangan intra-regional di Asia; ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat sebagai bagian dari total ekspornya terus menurun, sementara pangsa ekspor ke mitra Asia meningkat, sebagian besar mencerminkan pengalihan barang antara ke ASEAN untuk pemrosesan lebih lanjut. IMF juga menegaskan bahwa FDI ke ekonomi ASEAN tetap kuat dan pengumuman investasi masa depan menunjukkan perusahaan terus mengejar diversifikasi rantai pasok di kawasan. ([IMF](#))

Bagi ASEAN, dinamika ini menimbulkan paradoks. Di satu sisi, rivalitas AS–Tiongkok membuka peluang ekonomi karena perusahaan global mencari lokasi alternatif produksi, menerapkan strategi China-plus-one, dan memecah rantai pasoknya. Ini membantu menjelaskan mengapa ASEAN tetap menjadi destinasi investasi yang sangat menarik. ASEAN Investment Report 2025 menyebut FDI ke ASEAN naik 8 persen menjadi US\$226 miliar, mempertahankan posisi ASEAN sebagai penerima FDI terbesar di antara kawasan berkembang selama empat tahun berturut-turut. Bahkan laporan 2024 sebelumnya mencatat rekor US\$230 miliar pada 2023. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Di sisi lain, peluang itu datang bersama risiko ketergantungan baru. Bila investasi masuk terutama karena perusahaan ingin mem-bypass konflik tarif atau memecah produksi tanpa mentransformasikan kapasitas teknologi lokal, maka ASEAN hanya akan menjadi lokasi perakitan dalam strategi pihak lain. Hal inilah yang membuat ASEAN mulai berbicara lebih eksplisit tentang evolving geoeconomic landscape. Dalam Joint

Communiqué 58th AMM, para menteri luar negeri ASEAN mencatat rekomendasi ASEAN Geoeconomic Task Force agar kawasan memperdalam integrasi ekonomi, melaksanakan RCEP secara penuh, dan memanfaatkan sentralitas ASEAN untuk membentuk emerging economic order. Kalimat ini menunjukkan bahwa geoekonomi kini menjadi isu politik strategis, bukan sekadar urusan perdagangan teknis.

Persaingan AS–Tiongkok juga memerangkap ASEAN dalam logika saling ketergantungan yang tidak simetris. Dari sisi Tiongkok, dua arah perdagangan ASEAN–Tiongkok mencapai US\$772,4 miliar pada 2024, menyumbang sekitar 20,1 persen dari total perdagangan ASEAN, dan Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN sejak 2009. Dari sisi Amerika Serikat, USTR melaporkan bahwa total perdagangan barang dan jasa AS dengan ASEAN mencapai US\$571,7 miliar pada 2024, sementara total perdagangan barang pada 2025 mencapai US\$580,1 miliar. Artinya, ASEAN secara ekonomi tidak dapat menutup salah satu pihak tanpa menanggung biaya besar. Inilah sebabnya bahasa ASEAN cenderung menolak binary choice dan lebih memilih keterbukaan relasi ganda.

[\(ASEAN\)](#)

Secara naratif, ASEAN ibarat rumah besar yang berdiri di antara dua raksasa. Satu raksasa menawarkan pasar, investasi, konektivitas, dan kedekatan geografis; raksasa lain menawarkan akses teknologi, jaringan keuangan, keamanan, dan pasar global. Bagi ASEAN, persoalannya bukan sekadar siapa yang lebih penting, tetapi bagaimana mencegah salah satu menjadi terlalu dominan sehingga ruang pilihan kawasan mengecil. Karena itu, “sentralitas ASEAN” sesungguhnya adalah bahasa lain untuk mempertahankan otonomi strategis kolektif.

IV. Laut Cina Selatan: Ujian Nyata bagi Prinsip dan Persatuan ASEAN

Jika rivalitas AS–Tiongkok adalah tekanan struktural paling besar, maka Laut Cina Selatan adalah ujian paling konkret terhadap kohesi politik ASEAN. Dalam 58th AMM 2025, ASEAN membahas situasi di Laut Cina Selatan dan mencatat adanya kekhawatiran dari sebagian menteri

mengenai reklamasi, aktivitas, dan insiden serius yang membahayakan keselamatan, merusak lingkungan laut, mengikis kepercayaan, meningkatkan ketegangan, dan dapat merusak perdamaian, keamanan, serta stabilitas kawasan. ASEAN juga menegaskan kembali pentingnya non-militarisation, self-restraint, serta penyelesaian damai sengketa berdasarkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

Pernyataan itu penting karena menunjukkan dua hal sekaligus. Pertama, ASEAN masih mampu menyepakati bahasa bersama mengenai pentingnya UNCLOS, kebebasan navigasi, dan penyelesaian damai sengketa. Kedua, ASEAN tetap berhati-hati sehingga rumusan finalnya sering merefleksikan denominator bersama paling minimum. Dalam Chair's Statement KTT ASEAN ke-46, para pemimpin juga menegaskan pentingnya implementasi penuh DOC dan mendorong percepatan menuju Code of Conduct yang efektif dan substantif sesuai hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982. Namun fakta bahwa negosiasi COC telah berlangsung lama dan baru mencapai pembacaan ketiga dari Single Draft Negotiating Text menunjukkan bahwa ASEAN masih berhadapan dengan kesenjangan antara deklarasi normatif dan efektivitas praktis.

Laut Cina Selatan menjadi sangat sensitif karena di situ berpotongan hampir semua unsur geopolitik: klaim kedaulatan, jalur perdagangan, energi, hukum laut, kehadiran militer, dan reputasi tatanan berbasis aturan. Bagi negara-negara ASEAN yang berhadapan langsung dengan tekanan maritim, isu ini bersifat eksistensial. Namun bagi anggota lain, prioritasnya mungkin berbeda, misalnya stabilitas ekonomi, hubungan investasi, atau pembangunan domestik. Di sinilah sulitnya membangun satu posisi ASEAN yang lebih tegas. ASEAN bukan tidak mengerti urgensi masalahnya; ASEAN hanya memikul keragaman kepentingan yang sangat besar di dalam tubuhnya sendiri. Perbedaan ancaman yang dirasakan oleh anggota-anggota inilah yang kerap membuat bahasa ASEAN tampak hati-hati, lambat, atau ambigu, walaupun secara normatif tetap konsisten mendukung hukum internasional.

Namun kehati-hatian itu tidak selalu identik dengan kelemahan. Dalam tradisi ASEAN, stabilitas sering diupayakan melalui pengelolaan eskalasi, bukan penentangan frontal. Masalahnya, ketika lingkungan strategis makin keras, pendekatan semacam itu makin sulit menjawab tuntutan kredibilitas. Jika ASEAN terlalu lunak, ia dituduh tidak relevan; jika terlalu keras, konsensus internal dapat terganggu. Laut Cina Selatan, karena itu, bukan hanya sengketa maritim, tetapi cermin yang memperlihatkan batas-batas model diplomasi ASEAN itu sendiri.

V. Myanmar: Krisis Internal yang Menggerus Otoritas ASEAN

Selain tekanan eksternal, ASEAN menghadapi masalah yang sama seriusnya dari dalam: krisis Myanmar. Pada KTT ASEAN ke-46 tahun 2025, para pemimpin ASEAN menyatakan deep concern atas eskalasi konflik dan situasi kemanusiaan di Myanmar, serta minimalnya kemajuan implementasi Five-Point Consensus. Mereka menegaskan kembali bahwa 5PC tetap menjadi rujukan utama untuk menangani krisis politik Myanmar, mempertahankan pembatasan partisipasi Myanmar pada level non-politik dalam KTT dan pertemuan menteri luar negeri, serta menyerukan penghentian kekerasan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil.

Dalam Joint Communiqué 58th AMM, ASEAN kembali menegaskan posisi yang sama: 5PC tetap menjadi referensi utama, kekerasan terhadap warga sipil dikecam, bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre terus didorong, dan upaya utusan khusus tetap dilanjutkan melalui keterlibatan yang lebih inklusif terhadap berbagai pemangku kepentingan Myanmar. Bahkan konteks gempa bumi Myanmar pada 28 Maret 2025 memperlihatkan bahwa ASEAN masih menjadi kanal penting bantuan kemanusiaan regional. Akan tetapi, kelanjutan pernyataan-pernyataan tersebut dari tahun ke tahun juga memperlihatkan bahwa ASEAN belum mampu memindahkan krisis dari tahap pengelolaan menjadi penyelesaian.

Krisis Myanmar sangat merusak kredibilitas ASEAN karena menyentuh jantung klaim normatif organisasi ini. ASEAN ingin dilihat sebagai komunitas yang menjaga stabilitas, mengelola konflik, dan

mempromosikan regional resilience. Namun ketika salah satu anggotanya mengalami perang internal berkepanjangan dan organisasi hanya mampu menghasilkan tekanan terbatas, kepercayaan terhadap efektivitas ASEAN ikut menurun. Masalah ini menjadi lebih berat karena prinsip non-intervensi—yang historisnya membantu ASEAN menjaga kohesi—justru membatasi ruang gerak ketika krisis internal suatu negara sudah berdampak regional.

Dari sudut pandang geopolitik, Myanmar juga membuka ruang bagi kekuatan eksternal untuk memainkan pengaruh. Setiap kevakuman diplomatik atau kelembagaan hampir pasti akan diisi oleh aktor lain, baik negara tetangga, mitra besar, maupun jaringan non-negara. Karena itu, krisis Myanmar bukan hanya isu domestik satu negara anggota, tetapi ancaman langsung terhadap sentralitas ASEAN. Organisasi yang tidak mampu mengelola krisis di dalam rumahnya sendiri akan lebih sulit mengeklaim kemampuan memimpin arsitektur kawasan di luar rumahnya.

VI. Munculnya Minilateralisme: Quad, AUKUS, dan Tantangan terhadap Sentralitas ASEAN

Salah satu perubahan besar dalam arsitektur Indo-Pasifik adalah kebangkitan minilateralism—kerja sama keamanan dan strategis dalam format sempit, fleksibel, dan berorientasi tindakan. Quad pada 2025 menegaskan komitmen untuk memperdalam kerja sama demi free and open Indo-Pacific, termasuk pada isu keamanan maritim, ekonomi, teknologi, dan rantai pasok. Sementara itu, AUKUS terus bergerak maju; perjanjian kemitraan kapal selam bertenaga nuklir antara Australia dan Inggris pada 2025, serta penegasan lanjutan mengenai implementasi AUKUS, menunjukkan bahwa konfigurasi keamanan Indo-Pasifik makin ditentukan oleh jaringan kerja sama yang tidak dipimpin ASEAN. ([MEA India](#))

Bagi ASEAN, minilateralisme menciptakan dilema. Di satu sisi, ASEAN tidak dapat menolak kenyataan bahwa banyak negara mencari format yang lebih cepat, lebih fokus, dan lebih operasional untuk menghadapi ancaman baru.

Di sisi lain, makin kuatnya forum di luar ASEAN-led mechanisms dapat menggeser sentralitas ASEAN dari “pengarah” menjadi sekadar “tempat singgah diplomatik.” Itulah sebabnya dokumen-dokumen ASEAN terus menegaskan bahwa EAS, ARF, ADMM-Plus, dan mekanisme ASEAN-led lainnya harus tetap menjadi platform utama untuk membangun strategic trust. Dalam deklarasi ASEAN 2024 tentang AOIP untuk future-ready ASEAN, organisasi ini kembali menekankan bahwa arsitektur kawasan harus tetap ASEAN-centred, open, inclusive, transparent, resilient, and rules-based.

Masalahnya, sentralitas tidak dapat dipertahankan hanya dengan deklarasi. Ia harus diikuti dengan kapasitas agenda-setting, kecepatan respons, dan kemampuan menghasilkan public goods regional. Bila mekanisme ASEAN terlalu lambat sementara minilateral arrangements lebih cepat menghasilkan koordinasi keamanan, teknologi, atau logistik, maka secara bertahap pusat gravitasi kawasan akan bergeser. Di sinilah ASEAN menghadapi tantangan institusional yang serius: bukan sekadar mempertahankan forum, melainkan membuktikan kegunaannya di tengah dunia yang bergerak lebih cepat.

ASEAN Regional Forum sendiri dalam Annual Security Outlook 2024 menegaskan bahwa ARF tetap merupakan forum keamanan inklusif yang penting untuk dialog politik dan keamanan di Asia-Pasifik, serta perlu diperkuat sinerginya dengan ASEAN-led mechanisms lain agar tetap efektif menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Penekanan itu mengisyaratkan bahwa bahkan instrumen keamanan tradisional ASEAN pun menyadari tekanan atas relevansinya. Dalam bahasa sederhana, forum-forum ASEAN masih dibutuhkan, tetapi kebutuhan itu tidak menjamin daya tawar bila kinerjanya tidak meningkat.

VII. Dimensi Geoekonomi: ASEAN sebagai Arena dan Penerima Manfaat

Persaingan kekuatan besar terhadap ASEAN hari ini tidak bisa dipahami hanya melalui lensa keamanan. Justru pada banyak kesempatan, instrumen

geoekonomi menjadi lebih menentukan. ASEAN 2025 secara eksplisit menyatakan keprihatinan terhadap rising global trade tensions dan unilateral tariff measures, tetapi pada saat yang sama kawasan ini tetap menunjukkan daya tahan ekonomi. UNCTAD dan ASEAN dalam ASEAN Investment Report 2025 menyebut bahwa FDI ke ASEAN naik menjadi US\$226 miliar pada 2024, sementara IMF menilai perusahaan-perusahaan terus mencari diversifikasi rantai pasok di kawasan. Kombinasi ini menjelaskan mengapa ASEAN menjadi semacam “ruang kompensasi” bagi ketidakpastian global: ketika dunia terfragmentasi, banyak investor justru beralih ke Asia Tenggara. ([UN Trade and Development \(UNCTAD\)](#))

Namun, menjadi penerima manfaat tidak otomatis berarti menjadi penentu. Banyak investasi masuk ke ASEAN karena kawasan ini diposisikan sebagai bagian dari supply chain reconfiguration akibat ketegangan eksternal. IMF menunjukkan bahwa pergeseran ini berkaitan dengan ekspor barang antara dari Tiongkok ke ASEAN untuk pemrosesan lebih lanjut dan dengan relokasi parsial produksi, terutama ke negara-negara ASEAN yang terbuka terhadap FDI dan memiliki keterkaitan dagang kuat. Dengan demikian, ASEAN memperoleh peluang, tetapi peluang itu bersifat derivatif: ia muncul sebagai efek dari keputusan strategis perusahaan dan negara besar, bukan sepenuhnya dari desain otonom kawasan. ([IMF](#))

Di sinilah pentingnya integrasi ekonomi ASEAN. Jika ASEAN hanya menjadi kumpulan lokasi produksi yang terpisah-pisah, maka manfaat relokasi akan terfragmentasi dan mudah diperebutkan oleh logika kompetisi intra-kawasan. Sebaliknya, bila ASEAN memperdalam integrasi pasar, meningkatkan konektivitas, mengefektifkan RCEP, serta memperkuat ekosistem manufaktur, logistik, dan digital, maka Asia Tenggara dapat mengubah dirinya dari “lokasi alternatif” menjadi “platform strategis.” Dalam pidato Sekretaris Jenderal ASEAN pada RCEP High-Level Dialogue 2025, ditekankan bahwa RCEP yang inklusif dan terbuka dapat memperluas jangkauan integrasi regional; ia juga menyinggung bahwa ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai US\$1 triliun pada 2030, bahkan dapat menjadi US\$2 triliun dengan DEFA. Ini berarti arena geoekonomi ASEAN

bukan hanya manufaktur, tetapi juga ekonomi digital dan tata kelola perdagangan masa depan. ([ASEAN](#))

Ketika kita melihat angka perdagangan ASEAN–Tiongkok dan ASEAN–Amerika Serikat secara berdampingan, tampak jelas bahwa ASEAN hidup dalam struktur interdependensi berlapis. Hubungan dagang dengan Tiongkok sangat besar dan terus tumbuh; relasi dagang dan investasi dengan Amerika Serikat juga sangat besar. ASEAN karenanya tidak mungkin mengambil posisi isolasionis. Politik kawasan lebih realistis bila diarahkan pada pembentukan aturan main yang menguntungkan otonomi regional, bukan pada upaya memutus salah satu hubungan. Dengan kata lain, geoekonomi ASEAN bukan tentang memilih satu pasar, tetapi tentang membangun kapasitas agar tidak semata-mata diposisikan oleh pasar pihak lain. ([ASEAN](#))

VIII. Keberagaman Internal ASEAN: Sumber Kekuatan Sekaligus Kelemahan

Salah satu ciri mendasar ASEAN adalah heterogenitas. Anggota-anggotanya memiliki ukuran ekonomi, sistem politik, pengalaman kolonial, orientasi maritim, kedekatan geografis, serta struktur perdagangan yang berbeda-beda. Ada anggota yang sangat bergantung pada perdagangan global dan stabilitas pelayaran; ada yang lebih sensitif terhadap pembiayaan infrastruktur dan konektivitas darat; ada pula yang merasakan tekanan maritim secara langsung. Keberagaman ini membuat ASEAN kaya secara representasi, tetapi mahal dalam pengambilan keputusan. Bahasa konsensus ASEAN sering tampak umum justru karena harus menampung spektrum kepentingan yang sangat lebar.

Namun, keberagaman itu tidak selalu buruk. Dalam sejarah ASEAN, perbedaan internal justru mendorong budaya konsultasi dan kehati-hatian yang membantu mencegah polarisasi tajam. Masalah muncul ketika tekanan eksternal makin cepat dan keras, sementara mekanisme internal tetap lambat. Dalam situasi itu, perbedaan kepentingan mudah diterjemahkan pihak luar sebagai celah untuk memecah kohesi kawasan.

Karena itu, banyak dokumen ASEAN belakangan secara sengaja memasang kata "unity" dengan "centrality." Sentralitas tanpa persatuan tidak memiliki fondasi, sedangkan persatuan tanpa peran regional akan mengerdilkan ASEAN menjadi sekadar organisasi internal.

Keberagaman juga menjelaskan mengapa ASEAN sering bergerak lebih efektif dalam isu ekonomi dibanding keamanan. Pada isu ekonomi, manfaat integrasi lebih mudah dirasakan bersama: perdagangan naik, investasi masuk, rantai pasok berkembang. Pada isu keamanan, persepsi ancaman lebih terdistribusi tidak merata. Akibatnya, ASEAN lebih mudah bersatu dalam menolak tarif sepihak dan mendorong RCEP daripada dalam mengambil sikap yang keras terhadap sengketa maritim atau krisis politik internal anggota. Realitas ini tidak berarti ASEAN gagal, tetapi menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki asimetri kinerja yang perlu diakui secara jujur.

IX. Strategi ASEAN: Dari AOIP ke ASEAN 2045

Dalam menghadapi tekanan eksternal dan kerentanan internal, ASEAN sesungguhnya sudah membangun kerangka respons. AOIP 2019 memberikan landasan normatif: keterbukaan, transparansi, inklusivitas, complementarity, penghormatan pada hukum internasional, dan kerja sama dalam bidang maritim, konektivitas, SDGs, serta ekonomi. Deklarasi ASEAN 2024 tentang AOIP untuk future-ready ASEAN kemudian memperbarui tekad itu dengan menegaskan bahwa pergeseran geopolitik dan geostrategik harus membawa, bukan merusak, perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran; deklarasi tersebut juga mendorong dukungan konkret dari para mitra terhadap proyek-proyek AOIP, penguatan maritime stability, supply chains yang terbuka dan non-discriminatory, dan percepatan transformasi digital yang inklusif.

Langkah berikutnya adalah ASEAN 2045: Our Shared Future. Dalam deklarasi Kuala Lumpur 2025, ASEAN mengadopsi visi komunitas 2045 yang menekankan ASEAN yang resilient, innovative, dynamic, and people-centred. Dokumen itu juga secara eksplisit menegaskan penguatan

kapasitas institusional ASEAN dan Sekretariat ASEAN, mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas pilar, dan review berkala agar organisasi tetap adaptif terhadap perkembangan regional dan global. Ini penting, sebab salah satu kritik klasik terhadap ASEAN adalah kesenjangan antara ambisi politik dan kapasitas kelembagaan. Tanpa sekretariat yang lebih kuat dan mekanisme implementasi yang lebih tegas, sentralitas ASEAN akan terus lebih kuat di level wacana daripada di level eksekusi.

Dari sudut kebijakan, ada sedikitnya empat strategi yang perlu terus diperdalam oleh ASEAN. Pertama, memperkuat institusi regional agar forum-forum ASEAN bukan hanya ruang berbicara, tetapi ruang koordinasi yang menghasilkan respons. Kedua, memperdalam integrasi ekonomi dan konektivitas agar ASEAN memiliki bobot material yang lebih besar dalam menghadapi tekanan eksternal. Ketiga, mengembangkan kemampuan preventive diplomacy dan crisis management, terutama pada isu maritim dan Myanmar. Keempat, memperkuat agenda ekonomi digital dan industrial upgrading agar ASEAN tidak terjebak pada posisi hilir dalam restrukturisasi ekonomi global. Keempat arah ini pada dasarnya sudah tercermin dalam dokumen-dokumen resmi ASEAN; tantangannya adalah konsistensi implementasi.

X. Implikasi bagi Indonesia

Bagi Indonesia, tema ini memiliki arti strategis yang sangat besar. Indonesia bukan hanya negara terbesar di ASEAN, tetapi juga salah satu sumber utama legitimasi normatif bagi sentralitas ASEAN. AOIP sendiri lahir dari dorongan agar Indo-Pasifik tidak terjebak menjadi arena blok dan rivalitas terbuka. Dalam banyak hal, kepentingan Indonesia bertemu dengan kepentingan ASEAN: menjaga kawasan tetap terbuka, menolak dominasi satu kekuatan, mempertahankan kebebasan navigasi, memperkuat konektivitas, dan menghindari fragmentasi regional. Karena itu, kepemimpinan Indonesia di ASEAN akan selalu diukur bukan hanya dari kebijakan nasionalnya, tetapi dari kemampuannya menjaga organisasi tetap kohesif.

Dalam konteks praktis, Indonesia berkepentingan agar ASEAN tidak melemah di tiga front sekaligus: keamanan maritim, krisis Myanmar, dan geoekonomi. Jika ASEAN melemah pada isu maritim, maka tekanan terhadap hukum laut dan stabilitas kawasan akan meningkat. Jika ASEAN gagal pada Myanmar, legitimasi politik organisasi akan terkikis. Jika ASEAN gagal menata integrasi ekonomi baru, maka Asia Tenggara akan semakin menjadi lokasi penyesuaian rantai pasok pihak lain tanpa kapasitas naik kelas. Karena itu, bagi Indonesia, memperkuat ASEAN bukan pilihan idealistis, melainkan kebutuhan strategis jangka panjang.

XI. Penutup

ASEAN hidup di bawah bayang-bayang kekuatan besar, tetapi tidak sepenuhnya ditentukan oleh bayang-bayang itu. Organisasi ini masih memiliki modal penting: posisi geostrategis, pasar yang besar, daya tarik investasi, jaringan kelembagaan yang luas, dan legitimasi sebagai forum paling inklusif di Asia Tenggara. AOIP, ASEAN 2045, RCEP, ARF, EAS, dan berbagai deklarasi terbaru menunjukkan bahwa ASEAN sadar akan tantangan zamannya dan berupaya meresponsnya dengan bahasa keterbukaan, aturan, dan kerja sama.

Tetapi kesadaran tidak sama dengan keberhasilan. Sentralitas ASEAN akan terus diuji oleh empat hal: rivalitas AS–Tiongkok yang merembes ke semua sektor; konflik Laut Cina Selatan yang menuntut kredibilitas normatif; krisis Myanmar yang menggerogoti legitimasi internal; dan minilateralisme yang dapat menggeser pusat gravitasi arsitektur kawasan. Jika ASEAN berhasil memperkuat persatuan, institusi, dan kapasitas implementasinya, maka bayang-bayang kekuatan besar dapat diubah menjadi ruang manuver strategis. Jika tidak, ASEAN berisiko tinggal menjadi panggung diplomatik yang ramai, tetapi tidak lagi menentukan arah cerita.

Pada akhirnya, masa depan ASEAN tidak hanya bergantung pada apa yang dilakukan Washington, Beijing, Tokyo, Canberra, atau New Delhi, tetapi juga pada kemampuan negara-negara Asia Tenggara sendiri untuk terus melihat kawasan ini sebagai proyek bersama. Bayang-bayang kekuatan

besar memang nyata, tetapi bayang-bayang itu akan paling gelap justru ketika lampu persatuan regional meredup.

Glosarium

ASEAN Centrality

Prinsip bahwa ASEAN harus tetap menjadi jangkar utama dalam pembentukan agenda, dialog, dan arsitektur kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik.

AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)

Dokumen pandangan ASEAN yang menekankan kerja sama, inklusivitas, keterbukaan, dan sentralitas ASEAN dalam kawasan Indo-Pasifik.

ARF (ASEAN Regional Forum)

Forum keamanan multilateral yang dipimpin ASEAN untuk dialog politik dan keamanan di Asia-Pasifik.

ADMM-Plus

Forum kerja sama pertahanan antara negara-negara ASEAN dan mitra eksternal utama.

EAS (East Asia Summit)

Forum strategis tingkat tinggi yang mempertemukan ASEAN dan mitra utama kawasan untuk membahas isu politik, keamanan, dan ekonomi.

Five-Point Consensus (5PC)

Kesepakatan ASEAN mengenai langkah-langkah penanganan krisis Myanmar, termasuk penghentian kekerasan, dialog, dan bantuan kemanusiaan.

Hedging

Strategi menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan sekaligus untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada satu pihak.

Geoekonomi

Penggunaan instrumen ekonomi—seperti perdagangan, tarif, investasi, rantai pasok, dan teknologi—untuk tujuan strategis dan politik.

Minilateralisme

Bentuk kerja sama terbatas yang melibatkan sedikit negara dan biasanya lebih fokus, fleksibel, dan operasional dibanding forum multilateral besar.

RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership)

Perjanjian perdagangan bebas besar di Asia-Pasifik yang melibatkan ASEAN dan sejumlah mitra utama.

DOC (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea)

Deklarasi 2002 yang menjadi dasar pengelolaan perilaku para pihak di Laut Cina Selatan.

COC (Code of Conduct)

Kode etik/aturan perilaku yang sedang dinegosiasikan untuk mengatur interaksi para pihak di Laut Cina Selatan.

Referensi (APA 7)

Asian Development Bank. (2025). *Asian Development Outlook: December 2025*.

Association of Southeast Asian Nations. (2019). *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2024). *ASEAN Leaders' Declaration on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for the future-ready ASEAN and ASEAN-centred regional architecture*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *Chairman's Statement of the 46th ASEAN Summit*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *Joint Communiqué of the 58th ASEAN Foreign Ministers' Meeting*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2045: Our Shared Future*. ASEAN Secretariat.

Association of Southeast Asian Nations. (2025). *Remarks of the Secretary-General of ASEAN at the 5th RCEP High-Level Dialogue on Economic and Trade Cooperation*. ASEAN Secretariat.

ASEAN Secretariat & United Nations Trade and Development. (2024). *ASEAN Investment Report 2024: ASEAN Economic Community 2025 and foreign direct investment*.

ASEAN Secretariat & United Nations Trade and Development. (2025). *ASEAN Investment Report 2025: Foreign direct investment and supply chain development*.

ASEAN Regional Forum. (2024). *ASEAN Regional Security Annual Security Outlook 2024*.

International Monetary Fund. (2025). *Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, October 2025—Navigating trade headwinds and rebalancing growth*.

Ministry of External Affairs, Government of India. (2025). *Joint Statement by the Quad Foreign Ministers*.

Ministry of External Affairs, Government of India. (2025). *Joint Statement from the Quad Foreign Ministers' Meeting in Washington, D.C.*

Office of the United States Trade Representative. (2026). *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*.

UK Foreign, Commonwealth & Development Office. (2025). *UK/Australia: Nuclear-Powered Submarine Partnership and Collaboration Agreement*.

UN Trade and Development. (2024). *ASEAN Investment Report 2024*.

UN Trade and Development. (2025). *ASEAN Investment Report 2025*.

Rudy C Tarumingkeng: **ASEAN dalam Bayang-Bayang Kekuatan Besar**

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 4 April 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69d07b8b-4a48-839b-9d0d-f2b8e34095b3>